



Kendala dan Rekomendasi Perbaikan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan

Niam Wahzudik,[✉] Heri Triluqman Budisantoso,¹ Basuki Sulistio¹

¹Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.15294/ijcets.v6i2.26712>

Article History

Received : October 2018

Accepted : October 2018

Published : November 2018

Keywords

Curriculum assistance;
curriculum development;
curriculum expert; human
resources; vocational school

Abstrak

Perubahan dari setiap kurikulum senantiasa mengacu pada suatu pemikiran filosofis (ide) dan berbagai dasar pertimbangan tertentu yang dianut oleh satuan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengembangan kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditinjau dari aspek landasan pengembangan kurikulum. Penelitian dilaksanakan dengan desain penelitian survei. Tempat penelitian di SMK di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Data yang bersifat kuantitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, sedangkan data yang bersifat kualitatif akan diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengungkap makna yang tersirat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengembangan kurikulum di satuan pendidikan SMK telah sesuai dan menggunakan landasan pengembangan kurikulum, terdapat dukungan dari berbagai stakeholder namun masih terbatas, proses pendampingan kurikulum belum maksimal karena di tiap sekolah tidak ada sumber daya khusus ahli pengembangan kurikulum. Berbagai permasalahan dalam pengembangan kurikulum sekolah seperti terbatasnya keterlibatan *stakeholder*, kualitas sumberdaya manusia dan pendampingan kurikulum yang masih terbatas.

Abstract

The changes of curriculums always refer to a philosophical thought (idea) and various basic considerations adopted by the schools. The purpose of this study is to find out how the implementation of curriculum development in vocational schools is viewed from the aspect of the foundation of curriculum development. The study was carried out with a survey research design. the research sites are in Vocational Schools in Central Java Province. Data collection technique using questionnaires. Quantitative data were analyzed using quantitative descriptive analysis. Whereas qualitative data was interpreted qualitatively to reveal the meaning. The results showed that the curriculum development process in vocational schools was appropriate and already used the foundations of curriculum development. We also found that there was several supports from various stakeholders but still limited, the curriculum development assistance process was not optimal because each school does not has special resources to develop an appropriate and contextual curriculum from curriculum expert. At least we found various problems on the development of school curriculum such as the lack of stakeholder involvement, the poor quality of human resources and the assistance of the curriculum development that are still limited.

[✉] Corresponding author :

Address: Gd. A3 Lt. 1, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNNES, Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: niam.wahzudik@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Eksistensi bangsa Indonesia akan lebih diperhitungkan di mata dunia apabila bangsa ini mampu memberikan sebuah perubahan besar. Perubahan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan yang sedang berlangsung di era globalisasi menimbulkan banyak perubahan di segala bidang. Sekarang ini kebutuhan dan tuntutan dunia kerja pada era industri 4.0 menuntut tenaga kerja kompetitif. Oleh karena itu dunia pendidikan melalui lembaga pendidikan harus dapat mencetak manusia memiliki karakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, dan kompetensi bidang *technopreneurship* serta peka terhadap lingkungan lokal maupun global (Haryono et al., 2017).

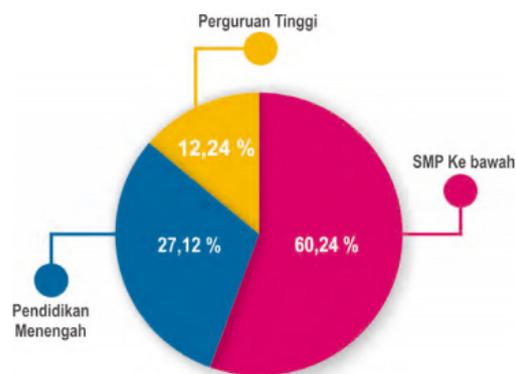
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan yang mendapat tugas berat dalam menghasilkan lulusannya sebagai calon tenaga kerja terampil kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 yang menyebutkan bahwa SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pada pasal tersebut juga dijelaskan SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan secara umum mempunyai tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi.

Berdasarkan pada pasal 15 tersebut pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Namun sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai (“Apindo: Kualitas Lulusan SMK,” 2017). Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kurang maksimalnya pencapaian

tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang kurang memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya (“2019: Presiden Jokowi Perintahkan Perombakan,” 2018). Akibatnya masih banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, dan menyebabkan pengangguran.

Fakta ini dapat dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2016 yang menunjukkan bahwa kondisi tenaga kerja Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan atau lulusan. Data tersebut dapat digambarkan pada diagram 1 di bawah ini.



Gambar 1 Tenaga Kerja Indonesia ditinjau Berdasarkan Lulusan Sekolah (BPS tahun 2016)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia yang berasal dari tingkat pendidikan yang lulusan dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah (Sekolah Dasar [SD]-SMP atau yang sederajat) sebanyak 60,24 %, sedangkan tenaga kerja dari lulusan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas [SMA], SMK atau sederajat) sebesar 27,12 %, dan tenaga kerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebesar 12,24 % dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Berdasarkan data gambar 1 dapat dikatakan bahwa persentase tenaga kerja paling banyak adalah dari lulusan SMP kebawah. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kemungkinan banyak tenaga kerja yang tidak terampil dan akibatnya produktivitas tenaga kerja Indonesia tertinggal dari negara Asia lainnya (Bank Dunia, 2014). Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 menyebabkan peningkatan kebutuhan pekerja terampil serta menurunkan kebutuhan pekerja tidak terampil (Chia, 2013).

Di sisi lain yang juga perlu diperhatikan adalah pertumbuhan jumlah SMK harus diikuti

oleh perkembangan kualitas lulusan SMK. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus dididik untuk menjadi sosok manusia ideal sesuai dengan amanat dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain dengan memberikan kontribusi terhadap kemampuan daya saing bangsa, mengingat Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam menyiapkan sumber daya manusia serta menyesuaikan diri dengan era industri 4.0. (Bakrun, 2018).

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka SMK harus senantiasa mengembangkan kurikulumnya. Kurikulum dalam sistem pendidikan memiliki peran sentral yang wajib diperhatikan dengan seksama karena kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Kurikulum yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mulai pada tahun 2006 sistem pendidikan di Indonesia telah memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai kurikulum operasional yang harus disusun dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing satuan pendidikan dan mengacu pada kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kurikulum nasional, termasuk yang terbaru berlakunya Kurikulum 2013.

Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan.

- (1) KTSP dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNP dan Kurikulum 2013.

Wujud dari KTSP adalah dokumen KTSP yang terdiri dokumen Buku 1, buku 2 dan buku 3. Kajian tentang kurikulum telah banyak dilakukan. Namun, kajian-kajian tersebut lebih mengungkap pada sisi kesiapan sekolah dan implementasinya dari kurikulum yang sedang berlaku. Secara umum penelitian Subagiyo *et al.* (2014) mengenai implementasi Kurikulum 2013 di Kalimantan Timur dan Kastawi *et al.* (2017) mengenai implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah telah mengidentifikasi beberapa kendala. Pada ranah pengembangan, kajian model pengembangan dan implementasi KTSP dengan dukungan dari *stakeholders* yang dilakukan oleh Samsudi (2012) serta Halimah *et al.* (2009) yang melakukan kajian tentang bagaimana pengem-

banagan model penyusunan KTSP yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berikutnya, fokus pada lingkup SMK, penelitian Maria *et al.* (2014) telah mengkaji kesiapan implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Metro. Widiyanto (2010) mencoba mengidentifikasi hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dunia industri di SMK. Wagiran (2007) menelisik dimensi filosofis pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk SMK. Beberapa penelitian tersebut fokus pada pengembangan kurikulum di SMK, namun belum menyentuh sisi kesesuaiannya dengan dasar teoretik pengembangan kurikulum.

Minimnya literatur kajian (penelitian) yang fokus pada bagaimana satuan pendidikan mengembangkan (menyusun) kurikulum terutama kajian keterterapan berbagai aspek landasan pengembangan kurikulum dan pendampingan kurikulum mendorong peneliti meneliti tema ini. Kajian ini akan memperkaya referensi kajian kurikulum, tidak hanya sekadar bagaimana implementasi suatu kurikulum di sekolah tetapi bagaimana suatu kurikulum itu dikonsepsikan, disusun hingga diimplementasikan dalam program pembelajaran di kelas. Artikel ini mendeskripsikan secara empiris proses pengembangan kurikulum di SMK ditinjau dari aspek keterterapan landasan pengembangan kurikulum, peran *stakeholder*, proses pendampingan, dan kendala penyusunan dokumen kurikulum (KTSP) yang berkualitas dan dapat dioperasionalkan.

METODE

Desain penelitian untuk studi kebijakan ini adalah survei. Subjek atau unit analisis untuk penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah yang diambil secara acak. Responden penelitian sebanyak 54 responden terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam waktu 8 bulan yaitu bulan April–September 2018. Prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan angket dan wawancara.

Angket dipergunakan untuk mengungkap data atau informasi terkait bagaimana proses pengembangan kurikulum di SMK yang ditinjau menurut aspek keterapan landasan pengembangan, peran stakeholder, proses pendampingan

kurikulum. Wawancara digunakan untuk mengungkap informasi berkaitan kendala SMK dalam mengembangkan dan menyusun dokumen kurikulum (KTSP). Sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan, metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Data yang bersifat kualitatif akan diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengungkap makna yang tersirat di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas empat bagian yaitu (1) keterterapan landasan pengembangan kurikulum, (2) peran *stakeholder*, (3) proses pendampingan kurikulum, dan (4) kendala penyusunan kurikulum. Adapun deskripsi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

A. Keterterapan Landasan Pengembangan Kurikulum

Pada umumnya kegiatan pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan atau acuan pemikiran yang menjadi dasar pertimbangan setiap pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum terdiri atas landasan filosofis, psikologis, sosiologis dan perkembangan teknologi. Informasi yang berasal dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru menunjukkan bahwa SMK di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2017/2018 yang sedang berjalan masih menggunakan dua kurikulum yaitu Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Secara filosofi dua kurikulum yang banyak diterapkan di sekolah sama-sama mengungkap masalah peningkatan kompetensi lulusan, namun untuk Kurikulum 2013 nuansa pengembangan karakter dan pengembangan Kompetensi Abad 21 diberikan porsi yang lebih besar. Sebagaimana karakteristik dari KTSP yang memberikan keluwesan sekolah dalam mengembangkan keunggulan lokal (penciri) di masing-masing sekolah, nampak bahwa keunggulan lokal tercermin pada rumusan visi, misi dan tujuan sekolah. Satuan Pendidikan (sekolah) yang berlatar belakang sekolah umum atau negeri lebih umum dalam merumuskan visi dan misi sekolah. Sedangkan sekolah dengan latar belakang keagamaan memiliki nuansa religius yang lebih besar dalam rumusan visi, misi dan tujuan sekolahnya.

Berdasarkan angket yang diisi oleh para

responden menunjukkan bahwa selama proses penyusunan kurikulum (dokumen KTSP) tim pengembangan kurikulum sekolah telah mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah. Dalam rumusan visi, misi dan tujuan sekolah inilah filosofi pendidikan dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum apakah telah mengacu pada landasan filosofis pada penelitian ini telah memperoleh informasi sebanyak 73% responden menyatakan selalu, 21% menyatakan sering, dan 6% responden menyatakan kadang-kadang menggunakan acuan visi, misi dan tujuan sekolah.

Data tersebut mengindikasikan bahwa tim pengembang kurikulum sekolah telah menggunakan kaidah pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan filosofis yang secara operasional dapat dipahami dari rumusan visi, misi dan tujuan sekolah. Filsafat sebagai salah satu landasan atau fondasi kurikulum dapat berfungsi sebagai pemandu tim pengembang kurikulum sekolah dalam merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum sekolah, karena jika pengembangan suatu kurikulum tanpa didasarkan pada satu atau beberapa aliran filsafat kurikulum tersebut akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Sukmadinata, 2014, pp. 38-45; Ornstein & Hunkins, 2018, pp. 46-70).

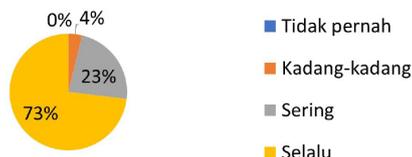
Pada era sekarang ini hampir tidak ada sekolah yang hanya menganut satu aliran filsafat saja, karena kebanyakan sekolah menggabungkan empat aliran filsafat sebagai dasar pengembangan kurikulum (Ansyar, 2015, p. 105). Filsafat pendidikan mana saja yang dianut oleh suatu sekolah tergantung pada karakteristik, situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan serta latar belakang pendidik dan pengelola sekolah.



Gambar 2 Penyusunan Kurikulum Mengacu Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Pada keterterapan aspek landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum diperoleh informasi bahwa selama pengembangan dan pelaksanaan kurikulum mempertimbangkan aspek psikologi belajar siswa. Landasan

psikologi dalam pengembangan kurikulum meliputi faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum (Sukiman, 2015, p. 29). Berkaitan dengan hal tersebut hasil penelitian ini sesuai pada gambar 3 dan 4 di bawah ini.

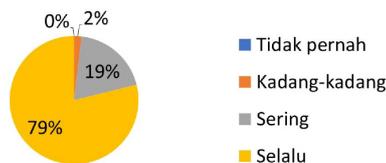


Gambar 3 Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dengan mempertimbangkan aspek psikologi belajar siswa

Berdasarkan data pada gambar 3 di atas menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum telah mempertimbangkan aspek psikologi belajar siswa di mana 73% responden menyatakan selalu, 23% menyatakan sering, dan 4% lainnya menyatakan kadang-kadang. Perhatian pada aspek psikologi belajar siswa dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan kurikulum, yaitu memberikan pengaruh pada bagaimana kurikulum itu dibelajarkan sesuai dengan karakteristik atau cara siswa belajar termasuk berbagai teori belajar manakah yang dapat diadopsi oleh pendidik. Dengan mengadopsi teori belajar dan gaya belajar siswa tentu para pendidik akan lebih mudah membelajarkan siswa dan tentu saja siswa juga akan merasakan kenyamanan ketika mengikuti proses pembelajaran karena belajar sesuai dengan gaya mereka belajar (Sukmadinata, 2014, pp. 131-149).

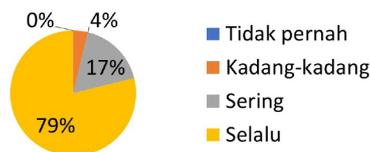
Selain pada aspek psikologi belajar, pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan aspek psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sebagai salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan siswa dalam konteks pengembangan kurikulum berpengaruh pada penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi atau isi kurikulum (Ornstein & Hunkins, 2018, pp. 113-146). Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin dalam dan luas apa yang dipelajari oleh siswa. Dengan memperhatikan perkembangan siswa diharapkan siswa belajar dan berkembang sesuai tingkat kematangan psikologinya sehingga tidak muncul permasalahan belajar. Kajian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pelaksanaan kurikulum mempertimbangkan aspek perkembangan siswa sebagaimana divisualisasi-

kan pada gambar 4 di bawah ini.



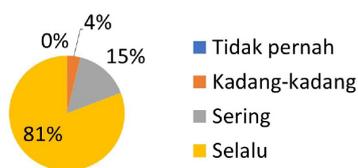
Gambar 4 Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum mempertimbangkan aspek psikologi perkembangan siswa

Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum dapat didefinisikan sebagai segala asumsi ataupun pemikiran sosiologis, hubungan interaksi dan kelas sosial masyarakat yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Keterapan landasan sosiologis dan budaya dalam pengembangan kurikulum dapat divisualisasikan pada gambar 5 di bawah ini yang secara general setiap kegiatan pengembangan kurikulum menggunakan pertimbangan sosiologis, perkembangan zaman dan budaya setempat agar hasil kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan di masyarakat.



Gambar 5 Pengembangan dokumen KTSP mempertimbangkan aspek sosiologis, perkembangan zaman dan budaya setempat

Kajian ini menunjukkan bahwa tim pengembang kurikulum sekolah telah menggunakan landasan sosiologis dalam menyusun kurikulum. Kajian landasan sosiologis ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran tentang besarnya tantangan pendidik dan pengelola pendidikan dalam mendesain kurikulum karena perubahan atau perkembangan sosial masyarakat, perkembangan zaman, Ipteks dan budaya masyarakat akan berdampak pada pendidikan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan kurikulum (Ornstein & Hunkins, 2018, pp. 151-172). Kurikulum yang dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan di masyarakat yang sangat dinamis, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tantangan kehidupan di abad 21 yang cepat berubah.



Gambar 6 pengembangan/penyusunan KTSP mengacu pada perkembangan IPTEKS terbaru

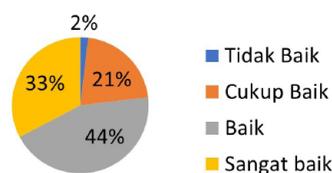
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) pada era revolusi industri 4.0 menunjukkan perubahan yang begitu cepat. SMK sebagai sekolah yang nantinya menghasilkan lulusan yang kompetensi dan siap bekerja dituntut memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menguasai Ipteks. Menghadapi hal tersebut kurikulum SMK harus relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Dinamika perkembangan Ipteks yang begitu cepat sedapat mungkin bisa diadaptasi dan diadopsi oleh SMK melalui penyesuaian kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri sebagaimana fungsi kurikulum sebagai wahana untuk mempersiapkan lulusan yang dibutuhkan di masa depan.

Pada kajian ini menunjukkan bahwa sekolah telah menggunakan pertimbangan perkembangan Ipteks sebagai salah satu landasan pengembangan kurikulum secara rinci dapat dicermati pada gambar 6 di atas. Berdasarkan kajian ini menguatkan bahwa perubahan konteks masyarakat di era digital sekarang ini, menuntut tim pengembang kurikulum sekolah untuk mampu membuat kurikulum yang tidak hanya membekali siswa dengan kompetensi profesional dan sosial saja tetapi perlu dibekali dengan kompetensi pengembangan diri yang dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman (Ansyar, 2015, p. 172).

B. Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kurikulum

Usaha meningkatkan dan tanggung jawab kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, namun perlu peran dan kolaborasi dari berbagai pihak yaitu pemerintah, sekolah, masyarakat dan tentu saja orang tua/wali siswa yang biasa disebut *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, peran *stakeholder* sangat dibutuhkan baik dalam wujud dukungan materi maupun non materi (ide, gagasan).

Stakeholder pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Contoh dari *stakeholder* internal yaitu guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Sedangkan contoh *stakeholder* eksternal pendidikan yaitu orang tua siswa, masyarakat umum, dunia usaha dan industri (DUDI), dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 33% responden menyatakan *stakeholder* pendidikan terlibat/berpartisipasi dengan sangat baik, 44% baik, 21% cukup baik dan hanya 2% yang menyatakan partisipasinya tidak baik dalam pengembangan kurikulum sekolah. Visualisasi kajian ini dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini.



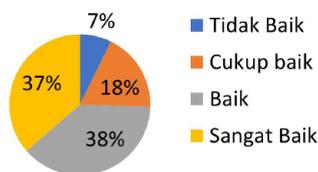
Gambar 7 Keterlibatan/Partisipasi warga sekolah (guru, tenaga kependidikan dan siswa) dalam proses penyusunan/pengembangan dokumen KTSP

Data penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran warga sekolah (*stakeholder* internal) telah sesuai dengan karakteristik dari kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di mana KTSP sebagai salah satu model pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi karena disusun oleh sekolah itu sendiri. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah (Sukmadinata, 2014, p. 201).

Kurikulum yang dikelola secara desentralisasi seperti KTSP menunjukkan peranan guru yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum. Guru turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam Program Tahunan (Prota), Program Semester (promes), atau satuan pelajaran tetapi juga dalam menyusun kurikulum secara menyeluruh untuk sekolahnya atau satuan pendidikan di mana guru tersebut bernaung. Dengan demikian karena guru sejak awal penyusunan kurikulum telah diikutkan (berpartisipasi), maka guru akan lebih memahami dan menguasai kurikulum yang diterapkan di sekolahnya dan tentu pelaksanaannya akan lebih tepat dan lancar. Dalam peran yang lebih kompleks guru berperan sebagai pengguna, perencana, pemikir, pe-

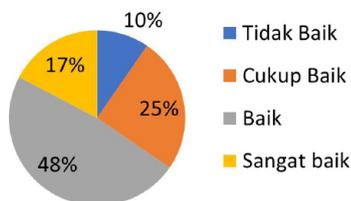
nyusun, pengembang, pelaksana dan evaluator kurikulum (Sukmadinata, 2014, p. 202).

Proses pengembangan kurikulum selain melibatkan warga sekolah (guru, tendik, dan siswa) juga memerlukan partisipasi komite sekolah. Riset ini menunjukkan bahwa 37% menyatakan sangat baik, 38% baik, 18% menyatakan cukup baik, dan 7% menyatakan selama ini komite sekolah tidak terlibat dengan baik saat sekolah menyusun KTSP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran komite sekolah untuk memberikan kontribusi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum dapat dikatakan baik. Visualisasi keterlibatan komite sekolah dalam proses pengembangan kurikulum dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini.



Gambar 8 Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan/pengembangan dokumen KTS

Selain melibatkan warga sekolah dan komite sekolah, proses pengembangan kurikulum memerlukan dukungan keterlibatan dari *stakeholder* yang berkepentingan dalam pendidikan, misalnya orang tua, dunia usaha dan dunia industri, birokrasi atas sekolah dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini (gambar 9) menunjukkan bahwa *stakeholder* masyarakat telah memberikan dukungan dalam proses pengembangan dokumen KTSP dengan rincian 17% sangat baik, 48% baik, 25% cukup baik, dan 10% menyatakan tidak baik.



Gambar 9 Keterlibatan *stakeholder* (masyarakat) dalam proses penyusunan/pengembangan dokumen KTSP

Sekolah sebagai bagian dari masyarakat dalam konteks pendidikan di SMK memiliki tugas untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja dan berusaha, karena jenis pekerjaan yang

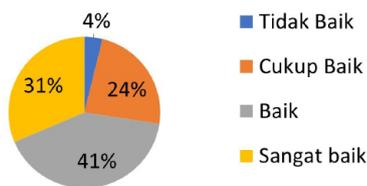
ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di sekolah (Sukiman, 2015, p. 44). Dengan demikian setiap pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan kompetensi yang ada di masyarakat dan relevansinya dengan jenis dan karakter pekerjaan. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan harus mampu menransformasikan nilai-nilai kebaikan yang dianut, diyakinin dan ditaati oleh masyarakat, sehingga hasil dari pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tidak bertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat.

C. Proses Pendampingan Kurikulum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa “Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan”. Artinya bahwa dalam rangka sekolah melaksanakan kurikulum 2013 di satuan pendidikan mendapatkan semacam bantuan agar pelaksanaan dari kurikulum yang berjalan dapat terlaksana dengan baik.

Merujuk pada Permendikbud di atas kegiatan pendampingan kurikulum dibedakan menjadi dua model, yaitu (1) model pendampingan di induk kluster/gugus satuan pendidikan dan (2) model pendampingan di satuan pendidikan. Model kluster dimaksudkan sebagai model pendampingan yang dilakukan oleh guru pendamping yang ada dalam satu induk kluster/gugus, sedangkan model pendampingan di satuan pendidikan dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan kurikulum dilaksanakan sangat baik (31%), 41% baik, 24% cukup baik, dan 4% menyatakan tidak baik. Jika data tersebut dicermati bahwa presentase cukup baik dan tidak baik hampir mendekati presentase 30%, artinya bahwa kegiatan pendampingan kurikulum yang selama ini ada masih terdapat kelemahan yang artinya membutuhkan perbaikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kualitas guru pendamping atau pun kualitas dari sekolah atau guru yang mengikuti pendampingan. Visualisasi proses pendampingan kurikulum dapat dilihat pada gambar 10.



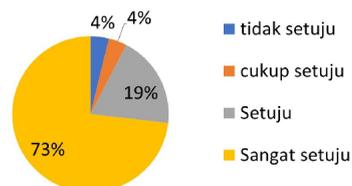
Gambar 10 proses pendampingan penyusunan/ pengembangan KTSP yang selama ini diterapkan di sekolah

Berkaitan dengan besarnya persentase cukup baik dan tidak baik (28%) pada kegiatan pendampingan kurikulum yang selama ini telah diterapkan di sekolah, nampaknya sesuai dengan apa yang sebenarnya sekolah butuhkan, terutama setiap ada perubahan kurikulum dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan.

Artinya sekolah membutuhkan alternatif cara bagaimana untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum di masing-masing satuan pendidikan, misalnya pengadaan ahli kurikulum di setiap satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden menyatakan sekolah membutuhkan ahli kurikulum (pengembang kurikulum) dengan rincian persentase 73% sangat setuju, 19% setuju, 4% cukup setuju dan 4% responden lainnya menyatakan tidak setuju jika di sekolah terdapat tenaga ahli yang secara khusus kompeten dalam pengembangan kurikulum.

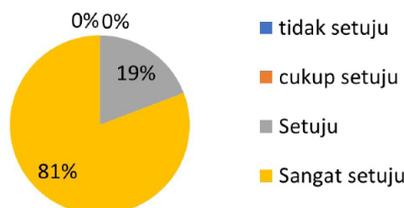
Keberadaan ahli kurikulum di setiap satuan pendidikan memberikan peluang dan manfaat besar bagi pengembangan dan implementasi kurikulum. Dengan adanya ahli kurikulum di setiap satuan pendidikan sangat membantu pihak sekolah dalam menterjemahkan dan memahami setiap kebijakan perubahan kurikulum, sehingga mampu meminimalisasi kesalahpahaman pemaknaan model kurikulum baru dan harapannya konsep dan implementasi kurikulum yang dari pusat akan tetap sama ketika diimplementasikan di level sekolah.

Hal ini juga memberikan peluang bagi setiap satuan pendidikan (sekolah-sekolah) untuk secara mandiri, relevan dan kontekstual dalam mengembangkan dan menyusun dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ahli kurikulum tersebut juga dapat membantu kepala sekolah ketika melakukan supervisi akademik, di mana kegiatan akademik tidak dapat terpisahkan dengan yang namanya kurikulum.



Gambar 11 Pendapat guru jika di sekolah terdapat Pengembang Kurikulum

Mengacu pada temuan tersebut, yakni mengenai urgensi adanya ahli pengembang kurikulum di setiap satuan pendidikan, juga didukung fakta bahwa pada kenyataannya tim pengembang kurikulum sekolah memerlukan pelatihan pengembangan kurikulum (81% responden sangat setuju dan 19% setuju) yang secara visual dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12 Pendapat sekolah jika ada pelatihan khusus bagi tim pengembang kurikulum di sekolah

Kebutuhan pelatihan bagi tim pengembang kurikulum sekolah sangat diperlukan, karena pada umumnya yang menjadi tim pengembang kurikulum sekolah adalah kepala sekolah dan guru yang belum tentu secara keilmuan atau kompetensi berlatar belakang sebagai ahli kurikulum, sehingga aktivitas pengembangan kurikulum lebih bersifat administratif saja. Misalnya administrasi dokumen KTSP untuk pendukung kegiatan akreditasi sekolah.

D. Kendala Penyusunan Kurikulum

Proses pendidikan senantiasa bergerak dinamis, tidak terkecuali dengan proses penyusunan kurikulum di tiap satuan pendidikan. Apalagi akhir-akhir ini perubahan kebijakan pendidikan dan pergantian kurikulum begitu cepat. Dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya menemui kendala. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan (sekolah) ketika mengembangkan kurikulum.

Pertama, keterlibatan stakeholder belum maksimal.

“(1) Keterlibatan stakeholder yang berkurang, (2) Dunia industri yang relevan, dan (3) Keterlibatan orang tua kurang maksimal.”

“Saat penyusunan kurangnya suplay ide atau gagasan dari guru dan anggota yang lain. Susah dalam menentukan materi dalam pengembangan kurikulum” (KDR).

“Kurangnya partisipasi guru, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya biaya” (AIS).

Berdasarkan pada informasi di atas menunjukkan bahwa peran *stakeholder* dalam rangka kegiatan pengembangan kurikulum memerlukan perhatian lebih. Apalagi untuk jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membutuhkan banyak kegiatan kerjasama, misalnya dunia usaha dan industri (DUDI) agar lulusan dari SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Bentuk keterlibatan dan kerjasama antara SMK dengan DUDI semacam ini biasa disebut dengan *Link and Match* (keterkaitan dan kesepadanan).

Konsep *link and match* antara dunia pendidikan dan industri adalah ideal, ada hubungan timbal balik untuk dilakukan, akan ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaannya. Adanya hubungan timbal balik ini membuat SMK dapat menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam hal ini ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program *link and match* yaitu SMK, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah (Hadam *et al.* 2017, p. 73).

Berikutnya, peran orang tua yang kurang maksimal turut mempengaruhi pengembangan kurikulum. Secara konsep kurikulum memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan anak, yaitu sebagai panduan orang tua dalam mendampingi dan mengarahkan anak ketika belajar di rumah.

Permasalahan lain yang menghambat kegiatan pengembangan kurikulum ialah disebabkan oleh kurangnya partisipasi guru. Meskipun tidak semua guru menjadi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang *output* kegiatannya berupa dokumen KTSP, sejatinya guru adalah pengembang kurikulum. Di tangan gurulah kurikulum yang sifatnya konseptual dan prosedural dalam skenario pembelajaran (RPP) dapat direalisasikan berupa kegiatan pembelajaran di kelas. Kaitannya hal tersebut dapat dikatakan bahwa

gurulah yang paling mengetahui dan merasakan kurikulum dapat berjalan dengan benar dan baik atau terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya.

Kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM).

“(1) Ketidapenguasaan materi KTSP, (2) Informasi tentang kurikulum.”(SMG)

“SDM yang masih kurang paham tentang IT ...”(SMGG)

“penentuan penilaian di dalam raport, penentuan kriteria kelulusan siswa.” (PGRS).

“Penggalian muatan lokal yang sesuai dengan daerah untuk diterapkan ke dalam mata pelajaran.”(BLR)

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan SMK yaitu masalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam lingkup persekolahan yang termasuk SDM pendidikan yaitu guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Pada level guru pengetahuan guru terhadap karakteristik dan materi KTSP serta informasi tentang kurikulum sering tertinggal yang disebabkan bisa karena kurang memahami dan memanfaatkan TIK. Permasalahan lainnya berkaitan dengan masalah penentuan kriteria kelulusan siswa dan mengisi nilai raport serta berbagai kesulitan sekolah dalam menggali muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah yang akan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain.

Ketiga, keterbatasan pendampingan kurikulum dari pemerintah.

“Pemerintah telah melaksanakan pelatihan dalam menerapkan kurikulum 2013 namun belum merata dirasakan semua guru” (SMG)

“Kurangnya fasilitas dari pemerintah mengenai proses pengembangan kurikulum terutama tim pengembang kurikulum yang belum memadai di tiap sekolah.” (ABW)

“Kurangnya pendamping ahli pada saat proses penyusunan, ... pembiayaan yang kurang sehingga kurang efektif” (SMGG).

“...guru-guru disini kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah, kurang penyuluhan. Kemudian, pemerintah dalam K-13 ini sangat mengedepankan tentang perkembangan zaman sementara sarana prasarana sekolah ini belum memadai untuk bisa benar-benar mengikuti perkembangan global” (GBG).

Permasalah pendampingan kurikulum ke setiap guru atau sekolah dirasakan masih terbatas meskipun pada permulaan setiap kebijakan

kurikulum baru biasanya pemerintah mengadakan pelatihan. Namun tidak semua guru terlibat atau mengikuti kegiatan pelatihan tersebut karena kurang sosialisasi, sehingga manfaatnya belum terasa. Pendampingan atau fasilitasi dari pemerintah kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) ternyata belum memadai. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa di satuan pendidikan membutuhkan pendampingan dari ahli kurikulum pada saat penyusunan dokumen KTSP.

Idealnya disetiap satuan pendidikan ada sumber daya khusus yang menangani masalah kurikulum. Jika ada SDM khusus pengembang kurikulum harapannya sekolah lebih siap dalam menghadapi perubahan dan adaptasi maupun adopsi kurikulum baru sehingga konsep kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama dengan apa yang dipahami oleh setiap pendidik di negeri ini dan harapannya mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pada temuan penelitian didasarkan pada pengakuan pada informan dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kurikulum di satuan pendidikan SMK telah sesuai dan menggunakan landasan pengembangan kurikulum, terdapat dukungan dari berbagai *stakeholder* namun masih terbatas, proses pendampingan kurikulum juga belum maksimal karena di tiap sekolah tidak ada sumber daya khusus ahli pengembang kurikulum. Berbagai permasalahan dalam pengembangan kurikulum sekolah yang digali melalui wawancara mendalam antara lain yaitu minimnya keterlibatan *stakeholder*, kualitas SDM dan pendampingan kurikulum masih terbatas. Agar pengembangan kurikulum SMK berjalan dengan baik perlu didukung dengan pendampingan dari ahli kurikulum.

Temuan ini di sisi lain dapat dikatakan memperkaya temuan dari hasil survei sebelumnya yang cenderung menunjukkan kesesuaian pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah dengan acuan dasar teoretiknya, bahwa sejatinya persentase besarnya kesesuaian pengembangan kurikulum berdasarkan pada landasan filosofi, psikologi, sosiologi, dan lainnya perlu dicek lebih dalam lagi akurasinya dengan menelisik lebih jauh fakta di lapangan. Tentu hal ini membutuhkan studi tersendiri yang memakan waktu dan energi yang tidak sedikit, mengingat kecenderungan para informan guru di sekolah

yang cenderung hanya mengungkapkan hal-hal yang positif saja mengenai sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2019, Presiden Jokowi Perintahkan Perombakan Besar-besaran Sistem Pendidikan Vokasi. (2018, 21 November). *Merdeka.com*. Diunduh dari <https://www.merdeka.com/uang/2019-presiden-jokowi-perintahkan-perombakan-besar-besaran-sistem-pendidikan-vokasi.html>
- Ansyar, M. (2015). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Apindo: Kualitas Lulusan SMK Belum Penuhi Kebutuhan Industri. (2017, 7 November). *Republika.co.id*. Diunduh dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/07/oz18yx382-apindo-kualitas-lulusan-smk-belum-penuhi-kebutuhan-industri>
- Bakrun, M. (2018). *Revitalisasi SMK Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0* [PowerPoint slides]. Retrieved from <https://www.scribd.com/presentation/384335354/Revitalisasi-SMK-Dan-Revolusi-Industri-4-0>
- Chia, S.Y. (2013). *The ASEAN Economic Community: Progress, challenges, and prospects*. ADBI Working Paper Series, No. 440.
- Hadam, S., Rahayu, N. & Ariyadi, A.N. (2017). *Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halimah, L., Rosita, D. R & Sudirjo, E. (2009). Pengembangan Model Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 9(2), 1-11.
- Haryono, Subkhan, E., & Widhanarto, G.P. (2017). 21st Century Competencies and Its Implications on Educational Practices. 9th *International Conference for Science Educators and Teachers*. Atlantis Press.
- Hasan, S.H. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kastawi, N.S., Widodo, S., & Mulyaningrum, E.R. (2017). Kendala dan Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah dan Strategi Penanganannya. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 5(2), 66-6.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Dokumen Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 159 Tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum*. Jakarta.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Keputusan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678 tahun 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan*. Jakarta.
- Maria, J., Ananda, N.K., & Sumadi. (2014). Kesiapan Impelementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Studi Kasus Di SMK Muhammadiyah 2 Metro). *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 2 (1), 57-69.
- Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2018). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. 7th Edition. Essex: Pearson.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Samsudi. (2012). Model Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berbasis Dukungan Stakeholders pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 19(1), 50-57.
- Subagiyo, L. & Safrudiannur. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 Pada Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014. *Jurnal Pancaran*, 3(4), 131-144.
- Sukiman. (2015). *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N.S. (2014). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wagiran. (2007). *Telisik Aliran Filsafat Pendidikan: Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Kejuruan*. Seminar Nasional Telisik Hambatan Pelaksanaan SMK dan Solusinya. Diunduh dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/penelitian/Pengembangan+Kurikulum+Pend.+Kejuruan.pdf>
- Widiyanto. (2010). Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi DUDI untuk SMK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*. 5(2), 103-116.